



Biro Adm. Pembangunan Daerah
Setda Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

kunjungi kami :

instagram : @bangda_jateng

website : bangda.jatengprov.go.id

youtube : BiroAdmBangdaProvJateng

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	1
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	7
1.5 Sistematika Penulisan	10
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2022	17
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran	36
3.3 Inovasi	37
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rekomendasi	39
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Mandat Kinerja	4
Tabel 1.2 : Daftar Kepangkatan Pegawai	8
Tabel 1.3 : Tingkat Pendidikan Pegawai	9
Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana	9
Tabel 1.5 : Anggaran Tahun 2022	10
Tabel 1.6 : Tindak Lanjut LHE SAKIP	12
Tabel 2.1 : RPJMD 2018-2023	14
Tabel 2.2 : Renja 2022	16
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja 2022	17
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan	18
Tabel 3.1 : Interval Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Program Utama	21
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Program Penunjang	22
Tabel 3.4 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA 2022	22
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2022 dan Tahun sebelumnya	21
Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2022 dan Target Tahun 2023	25
Tabel 3.7 : Analisis Penyebab Keberhasilan	27
Tabel 3.8 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel 3.9 : Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Proses Bisnis	6
Gambar 1.2 : Bagan Organisasi	7
Gambar 1.3 : Profil Pegawai	8
Gambar 2.1 : SSO Provinsi Jawa Tengah	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Organisasi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2023

**KERALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH**
SETDA
ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 1199603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c) Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

1.2 Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan

pembangunan. Pada tahun 2022, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi yaitu :

1. Beberapa SKPD dalam proses penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) masih belum optimal sehingga pada saat pelaksanaannya kurang dipedomani oleh SKPD sebagai pelaksana kegiatan.
2. Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tidak bisa segera dilaksanakan karena terkendala pada tahap pemenuhan dokumen persyaratan pencairan bantuan keuangan.
3. Beberapa SKPD maupun Kab/Kota sebagai pelaksana kegiatan belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, lengkap dan informatif.

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah.
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

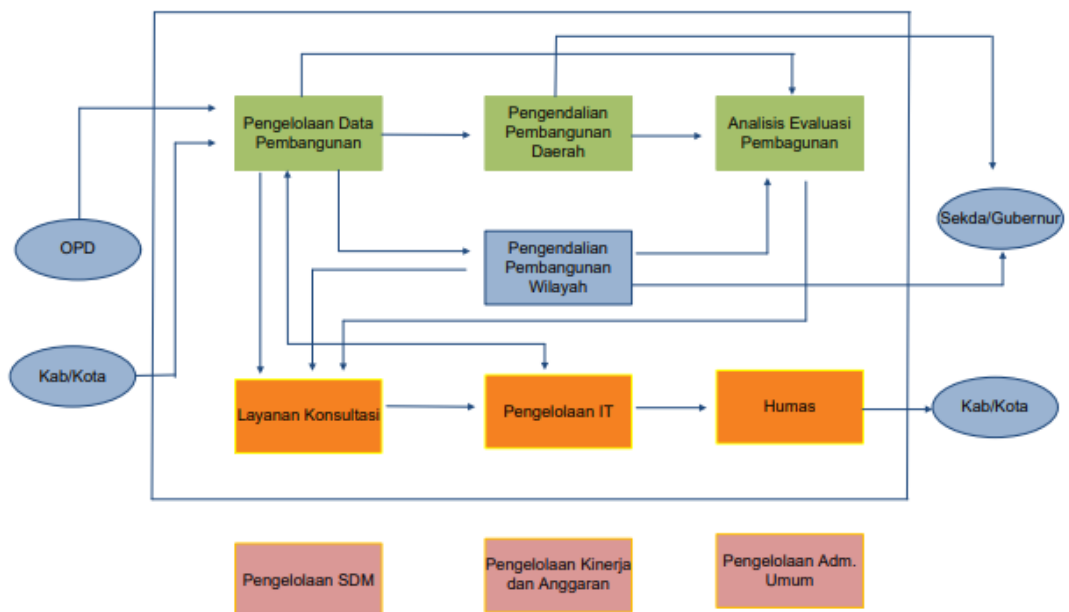
Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, maka dilakukan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah yang dituangkan dalam dokumen cascading Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah serta rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dituangkan dalam dokumen peta proses bisnis Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Tabel 1.1
Mandat Kinerja
Cascading Biro Adm. Bangda 2022

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan APBD	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD
			Capaian Pelaksanaan APBN		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN
			Persentase realisasi bantuan keuangan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II

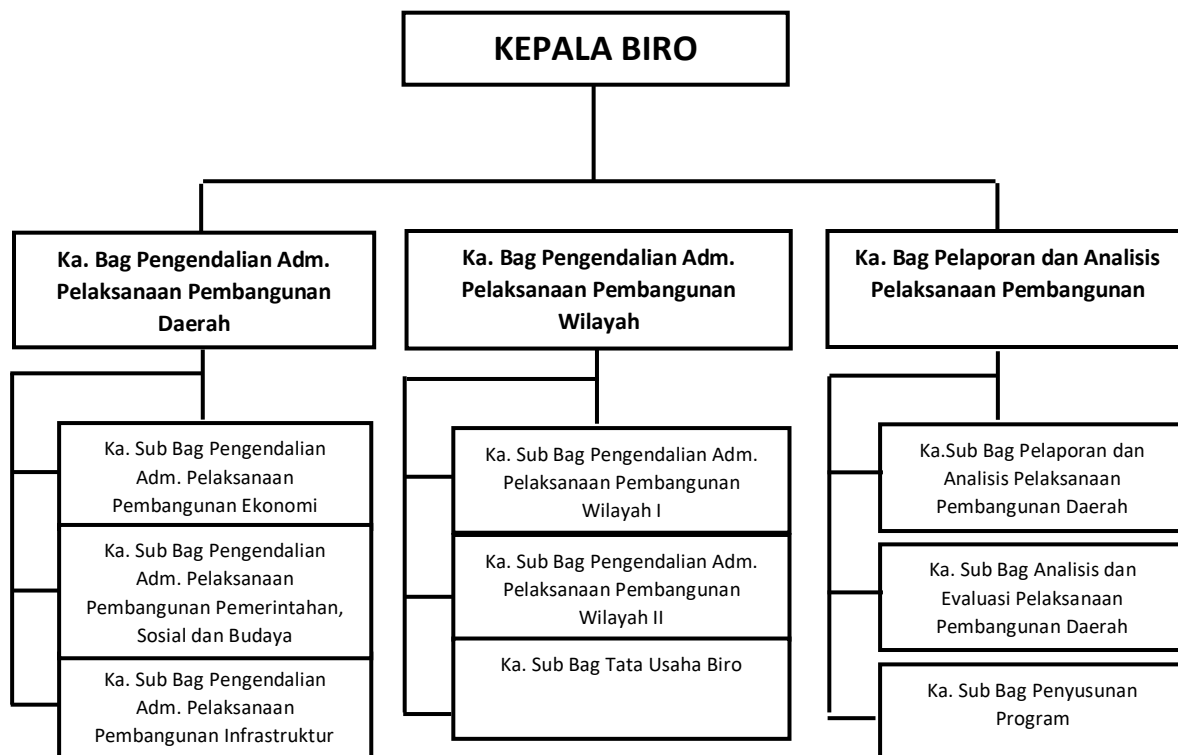
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III
			Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pembangunan Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pembangunan Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda

Gambar 1.1
Peta Proses Bisnis
Biro Administrasi Pembangunan Daerah



Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Gambar 1.2
 Bagan Organisasi
 Biro Administrasi Pembangunan Daerah
 (Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018)



1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada bulan Desember Tahun 2022, sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah berjumlah 30 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon II), 2 orang Analis Kebijakan Ahli Madya, 6 orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 2 orang Perencana Muda, 1 orang Arsiparis Pertama, 1 orang Kasubbag TU (eselon IV) dan 17 orang Jabatan Fungsional Umum.

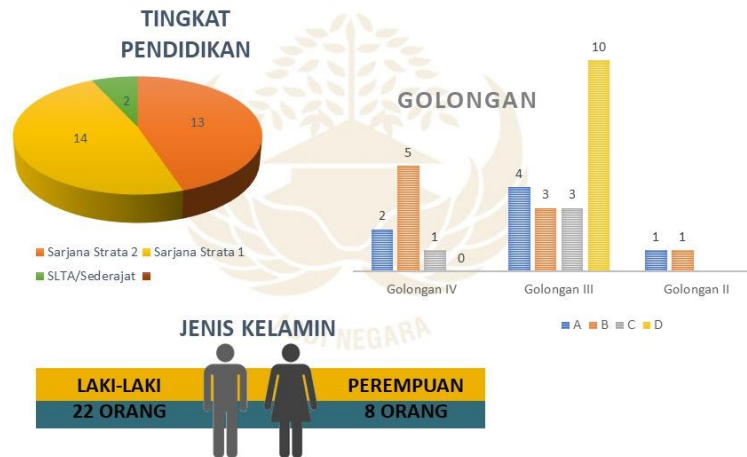
Gambar 1.3

Profil Pegawai

Biro Administrasi Pembangunan Daerah

GRAFIK PNS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Desember 2022



Tabel 1.2

Daftar Kepangkatan Pegawai
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang
2	Pembina Tk. I (IV/b)	5	Orang
3	Pembina (IV/a)	2	Orang
4	Penata Tk. I (III/d)	10	Orang
5	Penata (III/c)	3	Orang
6	Penata Md Tk. I (III/b)	3	Orang
7	Penata Muda (III/a)	4	Orang
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	Orang
9	Pengatur Muda (II/a)	1	Orang
Total		30	Orang

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana Strata 2	13 Orang
2	Sarjana Strata 1	14 Orang
3	SLTA/ sederajat	2 Orang
4	SD	1 Orang
Total		32 Orang

Selain itu, disamping adanya dukungan dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan Daerah juga didukung oleh bantuan tenaga non PNS sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan dari segi sarana dan prasarana, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Daerah didukung dengan adanya beberapa fasilitas sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	Ruang Rapat	3 Ruang	9	LCD Screen	3 Unit
2	Mesin Komputer	34 Unit	10	Harddisk	1 Unit
3	Printer	20 Unit	11	Mesin Fotokopi	1 Unit
4	Laptop	11 Unit	12	Meja	35 Unit
5	Mesin telepon/fax	1 Unit	13	Kursi	55 Unit
6	Mesin Ketik	1 Unit	14	Filling Kabinet	19 Unit
7	LCD	3 Unit	15	Mobil Dinas	8 Unit
8	TV	2 Unit	16	Motor Dinas	6 Unit

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2022, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Kebijakan Administrasi Pembangunan serta Program Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp 2.533.006.000,-.

Tabel 1.5
Anggaran Tahun 2022
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 1.905.000.000,-
2	Administrasi Umum	Rp 628.006.000,-
TOTAL		Rp 2.533.006.000,-

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 khusus pada lingkup Biro-Biro Setda Provinsi Jawa Tengah dikompilasi dalam dokumen LKjIP Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Tabel 1.6
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi & Misi

Adapun visi Provinsi Jawa Tengah adalah : "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan ke dalam 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut: membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru; menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Maka, melalui Renstra Sekretariat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan "Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah" sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
RPJMD 2018-2023
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Persentase kebijakan yang efektif	80	81	82	83	84
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	80	81	82	83	84
		Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	82	83	84	85
			Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	82	83	84	85

			Efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	81	82	83	84
			Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset yang dievaluasi	85	85	85	85	85

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator maupun target dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2
RENJA 2022
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET (2022)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98
				Capaian Pelaksanaan APBN	%	95
				Persentase realisasi bantuan keuangan	%	83
				Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	80
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	%	100

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100
--	---	---	--	--	---	-----

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berikut tabel perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah serta tabel Program dan Kegiatan Tahun 2022:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	1. Capaian Pelaksanaan APBD	%	98
		2. Capaian Pelaksanaan APBN	%	95
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	1. Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	%	83
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	1. Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	80
		2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100

4	Meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	1. Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	%	100
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	1. Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	%	100

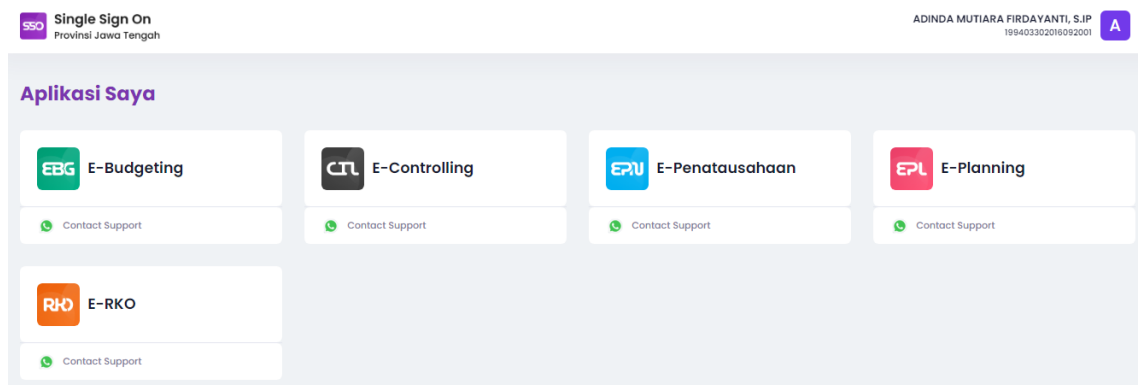
Tabel 2.4
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	ANGGARAN
1	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan APBD	98	Rp 325.000.000
		Capaian Pelaksanaan APBN	95	Rp 225.000.000
		Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	83	Rp 605.000.000
		Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	80	Rp 650.000.000
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	Rp 100.000.000
2.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	Rp 378.006.000
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	Rp 250.000.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Penerapan e-Government bertujuan untuk mempersingkat proses kerja birokrasi pemerintah dan memungkinkan adanya transparansi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Maka untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah didukung oleh Government Resources Management System (GRMS) yang memuat beberapa aplikasi antara lain e-budgeting, e-planning, e-RKO, e-penatausahaan, e-delivery dan e-controlling.

Gambar 2.1
Tampilan Single Sign On
Provinsi Jawa Tengah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2022, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	> 100%	Sangat Baik
2.	85 – 100%	Baik
3.	65– 84,99%	Cukup
4.	50 – 64,99%	Kurang
5.	< 50, %	Sangat Kurang

Sesuai Renja Tahun 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan utama yaitu **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki satu sasaran yaitu meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut tabel capaian kinerja Tahun 2022:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program Utama
Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALI-SASI	%	
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98	99,09	101,11	98,5
		Capaian Pelaksanaan APBN	%	95	98,99	104,2	95,50
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	%	83	99,57	119,96	85
	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	80	92	115	85
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100	100	100

Adapun tujuan penunjang yaitu **"Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah"**. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat dua sasaran yaitu meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Berikut tabel capaian kinerja Tahun 2022:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program Penunjang
Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	100	100	100

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	98	99,09	101,11	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja
		Capaian Pelaksanaan APBN	95	98,99	104,2	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja

	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	83	99,57	119,96	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja
	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	80	92	115	SANGAT BAIK	e-controlling kinerja
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	100	100	BAIK	e-controlling kinerja
2	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	100	100	BAIK	e-controlling kinerja
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100	BAIK	e-controlling kinerja

Berdasarkan tabel capaian dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah rata-rata realisasi capaiannya dikategorikan **SANGAT BAIK**.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021		
			TARGET	REALISAS	CAPAIAN	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	NA								
		Capaian Pelaksanaan APBN									
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan									
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah									
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi									

4	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, target maupun realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disandingkan karena indikator kinerja pada Tahun 2022 merupakan indikator baru berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	99,09	98,5	100,6
		Capaian Pelaksanaan APBN	98,99	95,50	103,65
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	99,57	85	117,14

3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	92	85	108,24
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	100	100
4	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	100	100
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 terhadap Target Akhir Tahun 2023 rata-rata tingkat capaiannya lebih dari 100%.

Tabel 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	98	99,09	101,11	pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik/ pembangunan prioritas daerah dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya (Biro APBJ, Inspektorat, Dinas PU BMCK, BPKAD, Bappeda) serta penyelesaian kendala permasalahan pelaksanaan APBD dengan segera pada kesempatan pertama.	
		Capaian Pelaksanaan APBN	95	98,99	104,2	Optimalisasi pengendalian Kegiatan APBN serta komitmen tinggi SKPD pengelola Kegiatan APBN, termasuk percepatan proses lelang	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	83	99,57	119,96	Pembagian DPA Bankeu Kab/Kota dan Bankeu Pemdes serentak pada awal tahun 2022 oleh BPKAD	

3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	80	92	115	Efektifnya sistem pengolahan data dalam mendukung fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	100	100		
4	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	100	100		
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2022 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain, pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD, APBN maupun bantuan keuangan serta pengendalian terhadap pelaporan pelaksanaan pembangunan yang

sesuai dengan ketentuan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan.

Tabel 3.8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
1	Capaian Pelaksanaan APBD	98	99,09	101,11	Rp 325.000.000	Rp 324.895.060	99,97	0,03
2	Capaian Pelaksanaan APBN	95	98,99	104,2	Rp 225.000.000	Rp 224.072.418	99,59	0,41
3	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	83	99,57	119,96	Rp 605.000.000	Rp 604.662.675	99,94	0,06
4	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	80	92	115	Rp 650.000.000	Rp 648.639.564	99,79	0,21
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis	100	100	100	Rp 100.000.000	Rp 98.829.760	98,83	1,17

	Pembangunan Daerah yang di Realisasi							
6	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	100	100	Rp 250.000.000	Rp 248.864.812	99,55	0,45
7	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	100	100	Rp 378.006.000	Rp 377.903.674	99,97	0,03

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 7 (tujuh) indikator program pada tahun 2022 sebesar Rp.2.533.006.000,- (99,80%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,2%.

Tabel 3.9
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91,97	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan APBD	99,09	Menunjang
					Capaian Pelaksanaan APBN	98,99	Menunjang
					Presentase Realisasi	99,57	Menunjang

					Bantuan Keuangan		
					Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	92	Menunjang
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	Menunjang
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	87,5	Administrasi Umum	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100	Menunjang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator kinerja didukung oleh 2 (dua) program dengan 7 (tujuh) indikator kinerja program. Adapun 7 (tujuh) indikator kinerja program tersebut didukung oleh 4 (empat)

kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program yang didukung oleh kegiatan pengendalian administrasi pembangunan Daerah, yang kemudian lebih spesifik didukung oleh pelaksanaan pada level sub kegiatannya yaitu indikator kinerja program capaian pelaksanaan APBD, capaian pelaksanaan APBN dan persentase Kabupaten/Kota yang pelaksanaan pembangunan wilayahnya dalam kategori baik.

Indikator kinerja program capaian pelaksanaan APBD diformulasikan dari realisasi fisik pelaksanaan APBD oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Indikator program tersebut didukung oleh sub kegiatan pengendalian administrasi pembangunan APBD. Fungsi pengendalian APBD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Pada tahap perencanaan pada TA 2022 dilaksanakan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja operasional melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dan verifikasi RKO terhadap 49 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengendalian terhadap progres realisasi fisik terhadap ketercapaian target yang telah dibuat. Pengendalian dilaksanakan dalam bentuk rakor APBD yang dilaksanakan triwulanan, monitoring dan evaluasi berkala maupun sewaktu-waktu serta penerbitan rekomendasi kebijakan dalam bentuk SE untuk mendukung percepatan pelaksanaan APBD TA 2022.

Adapun evaluasi terhadap belanja Daerah TA 2022 dari total Anggaran 24,6 triliun rupiah telah terealisasi 13,5 triliun rupiah atau 54,99%. Terdapat 11 SKPD yang berdeviasi fisik negatif yaitu Sekretariat DPRD, BPSDMD, Pusdataru, Dispermadesdukcipil, RSJD Soedjarwadi, RSJD Surakarta, Dinkes, Disporapar, BKD, Inspektorat dan Disdikbud.

Serta terdapat 16 SKPD realisasi keuangan di bawah rata-rata Provinsi (54,99%) yaitu Biro Isda, BKD, DKP, BMCK, Diskominfo, Pusdataru, Disporapar, RSUD Margono, RSUD Moewardi, Dinkes, ESDM, Nakeswan, Bappeda, BPKAD dan RSUD Tugurejo.

Indikator kinerja program capaian pelaksanaan APBN

diformulasikan dari rata-rata realisasi fisik DAK dan Dekon TP. Indikator program tersebut didukung oleh sub kegiatan pengendalian administrasi pembangunan APBN. Fungsi pengendalian APBN dilaksanakan melalui pelaksanaan rapat teknis pengendalian DAK Provinsi Jawa Tengah TA 2022 secara semesteran dan fasilitasi desk rekonsiliasi data progress pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN guna menginventarisir adanya potensi pelaksanaan kegiatan yang terlambat serta merekomendasikan langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaksana kegiatan.

Adapun evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kegiatan APBN Provinsi Jawa Tengah TA 2022, sebagai berikut:

- a. DAK fisik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.424,153 Miliar dikelola oleh 8 SKPD, terealisasi Rp.223,756 Miliar (52,75%), realisasi fisik 75,84%. Terdapat 2 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas DIKBUD (67,04%) dan Dinas Pusdataru (53,81%).
- b. DAK non fisik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.3,135 Triliun dikelola oleh 5 SKPD, terealisasi Rp.1,898 Triliun (60,54%) realisasi fisik 62,67%. Terdapat 2 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas DIKBUD (62,61%) dan Dinas P3AP2KB (58,60%).
- c. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 184,605 Miliar,- dikelola oleh 12 SKPD, terealisasi Rp.107,872 Miliar (58,43%), realisasi fisik 71,57%. Terdapat 2 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas LUTKAN (28,06%) dan Biro Pemotdaker (63,00%).
- d. Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 184,605 Miliar,- dikelola oleh 5 SKPD, terealisasi Rp.55,112 Miliar (54,63%), realisasi fisik 52,46%. Terdapat 2 SKPD dengan capaian fisik rendah yaitu Dinas NAKESWAN (25,14%) dan Dinas TANBUN (64,48%).
- e. Dana Desa sebesar Rp. 8,116 Triliun,- diampu oleh Dinas Permadesdukcapil dan dikelola oleh 29 Kabupaten, tersalur sebesar

Rp.7,549 T (93,02%).

Indikator kinerja program persentase Kabupaten/Kota yang pelaksanaan pembangunan wilayahnya dalam kategori baik

diformulasikan dari realisasi fisik bantuan keuangan 35 Kab/Kota. Indikator program tersebut didukung oleh sub kegiatan pengendalian administrasi pembangunan Wilayah. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2022 sebesar Rp 2.739.000.000.000,- yang terdiri atas Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 826.666.000.000,- dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 1.912.334.000,- .

Pada tahun 2022 Pembagian DPA Bankeu Kab/Kota dan Bankeu Pemdes dilaksanakan serentak oleh BPKAD pada awal tahun 2022 sehingga proses pelaksanaan kegiatan bisa dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu pada tahun anggaran berjalan.

Pada pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota TA 2022 diperoleh rata-rata sebagai berikut:

- a. Capaian Keuangan sebesar 93,31%
- b. Capaian Fisik kegiatan sebesar 98,58%
- c. Terdapat 9 Kabupaten yang capaian fisiknya tidak mencapai 100% (akibat dari tidak dilaksanakannya pekerjaan bantuan pendidikan karena kesalahan nomenklatur dan satu pekerjaan sarpras di Kabupaten Semarang yang tidak bisa dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan Provinsi, serta pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia di Kabupaten Rembang).

B. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yang didukung oleh kegiatan pelaporan pelaksanaan pembangunan, yang kemudian lebih spesifik didukung oleh pelaksanaan pada level sub kegiatannya yaitu Indikator kinerja program persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah serta

persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang di realisasi

Indikator kinerja program persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah didukung oleh sub kegiatan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah dan analisis capaian kinerja pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui pengendalian dengan alat bantu sistem aplikasi e-Controlling APBD maupun Kinerja yang kemudian data yang diinputkan dimutakhirkan dalam pelaksanaan desk rekonsiliasi data maupun monitoring dan evaluasi.

Disamping itu, Biro Administrasi Pembangunan Daerah juga melaksanakan desk capaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan hasil capaian kinerja 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2018-2023 sebagai berikut:

- a. Indikator sudah tercapai sebanyak 3 indikator: Persentase Penurunan Konflik Sara, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Nilai Tukar Petani;
- b. Indikator akan tercapai sebanyak 2 indikator: Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia;
- c. Indikator perlu upaya keras sebanyak 3 indikator: Inflasi, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka;
- d. Indikator menunggu rilis sebanyak 5 Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Indeks Wiliamson dan Indeks Pembangunan Gender.

Indikator kinerja program persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah. Fungsi fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait isu strategis pembangunan Daerah serta kompilasi dan pengolahan data sebagai bahan rekomendasi kebijakan.

Adapun hasil rekomendasi kebijakan teknis pada tahun 2022 antara lain terbitnya rekomendasi fasilitasi perubahan nomenklatur sub-sub

kegiatan (SSK), rekomendasi terhadap pengalokasian anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Provinsi Jawa Tengah dan dokumen laporan data inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan rekomendasi kebijakan.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja program persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro didukung oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diformulasikan dari jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro. Kegiatan administrasi umum perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang fasilitasi pelaksanaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perencanaan, kearsipan dan aset lingkup Biro serta fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pelayanan pimpinan yang sifatnya rutin.

D. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja program persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda didukung oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diformulasikan dari jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 antara lain penyusunan dokumen perencanaan meliputi Renja, Renstra dan RKA 2023 lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi konsultasi dan pendampingan perencanaan Biro-Biro serta pelaksanaan desk evaluasi dan pengendalian secara triwulan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2022, didukung dengan Anggaran sebesar sebesar Rp

Rp.2.533.006.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan.

Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
1	Capaian Pelaksanaan APBD	Rp 325.000.000	Rp 324.895.060	99,97
2	Capaian Pelaksanaan APBN	Rp 225.000.000	Rp 224.072.418	99,59
3	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	Rp 605.000.000	Rp 604.662.675	99,94
4	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	Rp 650.000.000	Rp 648.639.564	99,79
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	Rp 100.000.000	Rp 98.829.760	98,83
6	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	Rp 378.006.000	Rp 377.903.674	99,97
7	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	Rp 250.000.000	Rp 248.864.812	99,55

3.3 INOVASI

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan di kawasan pedesaan, Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Data menunjukkan bahwa tiap tahun anggaran, alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa beserta jumlah kegiatan penggunaannya cenderung terus meningkat. (T.A 2018 Rp0,93 Triliun, 19.042 kegiatan; T.A 2019 Rp1,380 Triliun, 22.549 kegiatan; T.A 2020 Rp1,187 Triliun, 20.840 kegiatan; T.A 2021 Rp1,279 Triliun, 18.118 kegiatan; dan TA 2022 Rp1,795 Triliun, 20.682 kegiatan). Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatannya secara langsung ke seluruh titik lokasi yang tersebar di 7.809 desa se Jawa Tengah.

Disisi lain, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah pada tahun-tahun sebelumnya), Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan dokumen Laporan PertanggungJawaban (LPJ) setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. LPJ biasanya disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Persentase penyampaian LPJ kurang optimal rata-rata dibawah 50%, sehingga tidak bisa menggambarkan kinerja pelaksanaan bantuan keuangan.

Merespon permasalahan tersebut, inovasi aplikasi PAK BEJO hadir sebagai upaya penyediaan data perkembangan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa secara lebih lengkap, cepat dan akurat serta dilaporkan langsung oleh seluruh Pemerintah Desa, guna mendukung pengendalian pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 108.05% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Program **Capaian Pelaksanaan APBD**, realisasi capaiannya sebesar 101,11% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- b. Indikator Kinerja Program **Capaian Pelaksanaan APBN**, realisasi capaiannya sebesar 103,65% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- c. Indikator Kinerja Program **Persentase Realisasi Bantuan Keuangan**, realisasi capaiannya sebesar 117,14% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- d. Indikator Kinerja Program **Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, realisasi capaiannya sebesar 115% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
- e. Indikator Kinerja Program **Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi**, realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.
- f. Indikator Kinerja Program **Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah**, realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.
- g. Indikator Kinerja Program **Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda** realisasi capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Baik**.

4.2 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya direkomendasikan tetap mempertahankan capaian yang sudah baik namun harus tetap meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin berkembang guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Februari 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGANGUNAN DAERAH**



ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 199603 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Telpun (024) 8311174 (20 Saluran)
Fax : 024 – 8311266 semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Februari 2022

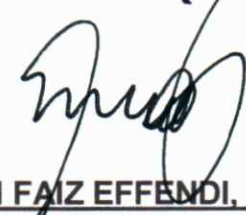
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH


ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA

Pembina Tingkat I

NIP. 19710909 199603 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD	98%
		Capaian Pelaksanaan APBN	95%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah	Presentase Realisasi Bantuan Keuangan	83%
3	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	80% 100%
4	Meningkatnya kualitas administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100%
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.675.000.000	APBD
Program Administrasi Umum	628.006.000	APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

Samarang, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH



ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19710909 199603 1 006